



EVALUASI KOLABORASI KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) AIR BENGKULU (Studi Kasus di Desa Rindu Hati, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah)

EVALUATION OF INSTITUTIONAL COLLABORATION IN THE MANAGEMENT OF THE AIR BENGKULU RIVER BASIN (Case Study in Rindu Hati Village, Taba Penanjung District, Central Bengkulu Regency)

Henny Aprianty¹⁾; Heru Purnawan^{2)*}; Ocha Putri Kauri²⁾

¹⁾²⁾³⁾ Program Studi Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email: shane.purnawan@gmail.com

How to Cite :

Aprianty.H., Purnawan, H., Kauri, O.P. (2024). EVALUASI KOLABORASI KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) AIR BENGKULU (Studi Kasus di Desa Rindu Hati, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah). SENGKUNI Journal – Social Sciences and Humanities, 5(2) . DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.5.2.193-202>

ARTICLE HISTORY

Received [27 July 2024]

Revised [25 August 2024]

Accepted [29 November 2024]

Published [31 December 2024]

KEYWORDS

Evaluasi, Kolaborasi,
Daerah Aliran Sungai

ABSTRAK

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan ruang di mana sumberdaya alam, terutama vegetasi, tanah dan air, berada dan tersimpan serta tempat hidup manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu UUD Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) air Bengkulu, bahwa daerah aliran sungai merupakan salah satu bagian sumber daya air yang mempunyai arti penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif dan penelitian ini menggunakan metode studi kasus, Evaluasi program Collaborative terkait Evaluasi Kolaborasi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: Komunikasi, Koordinasi Pengambilan Keputusan, Penyelesaian Konflik, Monitoring dan Evaluasi, Prosedur dan Perbaikan Tujuannya adalah untuk mengetahui Langkah tahapan apa saja yang telah terpenuhi. Model dan proses kolaboratif dalam evaluasi kolaborasi kelembagaan dalam pengelolaan DAS Air Bengkulu adanya kepemimpinan lembaga/instansi yang menjadikan monitoring dan evaluasi kolaborasi kelembagaan dalam pengeolaan DAS Air Bengkulu terlaksana. Integrasi tersebut tidak membuat unit-unit dari lembaga/instansi menyatu karena dalam

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



pelaksanaannya pada dasarnya adalah campuran dimana lembaga/instansi terkait memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada batas lintas wilayah administrasi serta peran Masyarakat, mengedepankan keterpaduan kepentingan berbagai sektor dan wilayah, menjadi dasar dalam perumusan strategi mempertahankan Daya Dukung DAS yang meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

ABSTRACT

A river basin (DAS) is a space where natural resources, especially vegetation, land and water, are located and stored as well as a place where humans live to utilize these natural resources to meet their daily needs. Bengkulu Provincial Regional Regulation UUD Number 1 of 2017 concerning Management of Bengkulu River Watersheds (DAS), states that river watersheds are a part of water resources which have an important meaning for human survival and welfare. This research uses a qualitative descriptive method approach and this research uses a case study method, Collaborative program evaluation related to Evaluation of Institutional Collaboration in the Management of the Air Bengkulu Watershed (DAS) based on Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning Management of the Watershed (DAS), namely: Communication, Coordination of Decision Making, Conflict Resolution, Monitoring and Evaluation, Procedures and Improvements. The goal is to find out what steps have been fulfilled. Collaborative models and processes in evaluating institutional collaboration in the management of the Air Bengkulu watershed have the leadership of institutions/agencies that make monitoring and evaluation of institutional collaboration in the management of the Air Bengkulu watershed implemented. This integration does not make the units of the institution/agency unite because in its implementation it is basically a mixture where the relevant institutions/agencies have their respective duties and functions. Implemented in accordance with spatial plans and water resource management patterns in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, carried out in a coordinated manner involving relevant agencies at cross-administrative boundaries as well as the role of the community, prioritizing the integration of the interests of various sectors and regions, becoming the basis for the formulation strategy to maintain the Carrying Capacity of the DAS which includes the formulation of policies, programs and activities.

PENDAHULUAN

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan ruang di mana sumberdaya alam, terutama vegetasi, tanah dan air, berada dan tersimpan serta tempat hidup manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya di sekitar, DAS juga dipandang sebagai ekosistem dari daur air, sehingga DAS didefinisikan sebagian suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022 Tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Unit pelaksanaan teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, bahwa untuk mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi, serta organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu UUD Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) air Bengkulu, bahwa daerah aliran sungai merupakan salah satu bagian sumber daya air yang mempunyai arti penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Bengkulu semakin memprihatinkan dan berdampak langsung pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat sehingga harus dikelola dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengkulu merupakan Daerah Aliran Sungai regional dan bentang alam yang memiliki peran penting bagi masyarakat di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengkulu terbagi dalam 3 SubDAS (BPDAS Ketahun, 2006), yaitu: 1) Sub-DAS Rindu Hati mencakup area seluas 19.207 ha; 2) Sub-DAS Susup mencakup area seluas 9.890 ha; dan 3) Sub-DAS Bengkulu Hilir mencakup area seluas 22.402 hektar. Enam anak sungai yang mengalir ke Sungai Air Bengkulu adalah: 1) Sungai Susup; 2) Sungai Rindu Hati; 3) Sungai Kemumu; 4) Sungai Pasemah; 5) Sungai Sialang; dan 6) Sungai Muara Kurung. Sungai Susup adalah bagian dari Sub-DAS Susup. Sungai Rindu Hati dan Kemumu membentuk Sub-DAS Rindu Hati. Sungai Pasemah, Sialang, dan Muara Kurung membentuk Sub-DAS Bengkulu Hilir (Zairin, dkk., 2019). Berdasarkan survei peneliti sebelumnya adanya lima aktivitas yang dianggap membahayakan sumber daya air di DAS Air Bengkulu yaitu pertambangan di daerah hulu; pengumpulan tailing limbah batu bara di sungai; pabrik karet; PDAM sebagai penyedia air dan pertanian (agroforestri dan pertanian padi irigasi). Pertambangan batubara di Provinsi Bengkulu rata-rata dilakukan dengan cara pertambangan terbuka. Lokasi konsesi banyak berada pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti DAS Ketahun, DAS Air Bengkulu, dan lainnya. Kondisi terparah saat ini adalah Sungai Air Ketahun dan Sungai Air Bengkulu. Berdasarkan survei peneliti sebelumnya adanya lima aktivitas yang dianggap membahayakan sumber daya air di DAS Air Bengkulu yaitu pertambangan di daerah hulu; pengumpulan tailing limbah batu bara di sungai; pabrik karet; PDAM sebagai penyedia air dan pertanian (agroforestri dan pertanian padi irigasi). Pertambangan batubara di Provinsi Bengkulu rata-rata dilakukan dengan cara pertambangan terbuka. Lokasi konsesi banyak berada pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti DAS Ketahun, DAS Air Bengkulu, dan lainnya. Kondisi terparah saat ini adalah Sungai Air Ketahun dan Sungai Air Bengkulu.

LANDASAN TEORI

Pengertian Collaborative Governance

Dalam memahami eksistensi multi stakeholders dalam urusan publik. Collaborative Governance merupakan bentuk dari New Public Governance. (Nasrulhaq, dkk., 2022). Collaborative Governance merupakan pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga yang melibatkan pemangku kepentingan non-state dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk membuat atau menetapkan kebijakan publik, mengelola program publik, atau aset publik. Collaborative Governance menetapkan standar partisipasi pada pemangku kepentingan yang tidak hanya bersifat konsultatif tetapi juga menyiratkan komunikasi dua arah dengan proses kolektif (Mutiarawati & Sudarmo, 2021). Pada dasarnya Collaborative Governance muncul akibat dari kegagalan pemerintah implementasi, adanya politisasi terhadap regulasi, serta tingginya biaya yang dibutuhkan. Kemunculan kompleksitas pada perkembangannya mengakibatkan kondisi ketergantungan sehingga meningkatnya permintaan kolaborasi.

Konsep Kelembagaan DAS

Teori Kelembagaan dan Organisasi melahirkan Teori Kelembagaan Baru. Menurut Scott (2008: vii) studi lembaga dan organisasi mulai berinteraksi semenjak era 1970-an, yaitu dengan tumbuhnya perhatian pada pentingnya bentuk-bentuk keorganisasian (organizational forms) dan lapangan organisasi (organization fields). Pelembagaan adalah proses di mana hubungan kendala dengan distrik lokal telah berkembang dari waktu ke waktu, institusionalis yang lebih lama melihat organisasi sebagai unit yang telah dilembagakan dan dikunci dalam lokus proses. Wilayah DAS Air Bengkulu mencakup dua daerah administrasi: Pemerintah Kota Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Sehingga, bukan satu dinas pemerintahan saja yang mengatur DAS ini. DAS merupakan kesatuan dari lahan, air, tanah, vegetasi, dan mahluk hidup, berada di dua wilayah mencakup daerah seluas 51.500 ha berlokasi di kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Peraturan pelaksanaan yang terkait dengan Daerah Aliran Sungai pada tanggal 1 Maret 2012, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai oleh Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan akan menjadi mediator antara kementerian/lembaga dan antarwilayah administrasi agar dapat terselenggara 39 pengelolaan DAS yang rasional dan berkelanjutan serta Peraturan Pemerintah ini menjadi salah satu acuan atau dasar dalam menyusun rencana pengelolaan DAS terpadu di seluruh wilayah Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang "Evaluasi Kolaborasi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu (Studi Kasus di Desa Rindu Hati Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah). Penelitian ini memfokuskan pada evaluasi Kolaborasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu di Desa Rindu Hati Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah "Bagaimana evaluasi Kolaborasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu di Desa Rindu Hati Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah?. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami evaluasi Kolaborasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu di Desa Rindu Hati Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif dan penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan pengamatan terlibat dan fokus grup diskusi. Penelitian dilakukan di Desa Rindu Hati Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah Provinsi

Bengkulu. Penelitian dilakukan di Desa Rindu Hati Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian disana karena tertarik untuk mempelajari bagaimana mengevaluasi (menilai) kolaborasi kelembagaan dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Air Bengkulu. Selain itu, lokasi penelitian masih berada di wilayah aktivitas. Dalam hal peneliti menggunakan informan utama dan informan pendukung sebagai subjek dari penelitian. Informan kunci merupakan informan yang mengerti topik penelitian yang dibahas secara menyeluruh. Peneliti telah menetapkan informan dalam pelaksanaan penelitian ini dengan urutan informan yaitu:

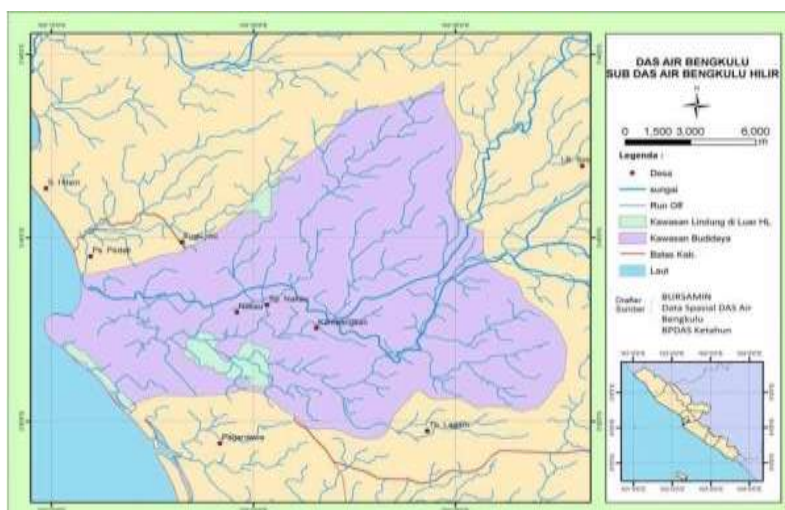
Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Umur	Jenis Kelamin
1	Agus Sukamto	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS (BPDAS HL) Ketahun Bengkulu	37th	Laki-laki
2	Muhammad Fajrin Hidayat	Kepala Forum DAS Provinsi Bengkulu	48th	Laki-laki
3	Yariswan	Kepala Saksi KPISDA BWSSS VII Kota Bengkulu	52th	Laki-laki
4	Mauludin	Kepala Dusun Rindu Hati	38th	Laki-laki
5	Meri Kusnawati	Bendahara BuMDes	38th	Perempuan
6	Leni Widiyastutu	Masyarakat Desa		Perempuan
7	Amin	Masyarakat Desa	64th	Laki-laki
8	Susanti	Masyarakat Desa	38th	Perempuan

Metode atau Teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yakni data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification (Rukajat, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam membentuk dan mengelola kelembagaan diperlukan pembagian tugas dan fungsi untuk mempermudah tercapainya tujuan suatu lembaga. Dalam Pasal 4 PerMenLhk Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 disebutkan bahwa BPDASHL melakukan pembagian tugasnya dengan membentuk struktur organisasi yang terdiri dari kepala BPDASHL, subbagian tata usaha, seksi program Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, seksi rehabilitasi hutan dan lahan, seksi evaluasi daerah aliran sungai dan hutan lindung dan kelompok jabatan fungsional.



Gambar Peta DAS Air Bengkulu

DAS sebagai satu kesatuan alamiah tetap ada dan tidak dapat diabaikan dalam pengembangan sumber daya alam yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan dari DAS. DAS diartikan sebagai suatu wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, DAS diartikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Tabel 2. Gambaran Detil DAS Air Bengkulu, 2018

	Kecamatan	Total Luas (Ha)	Luas Yang Masuk DAS	
			(Ha)	(%)
Bengkulu Tengah	Taba Penanjung	25.413	25.413	100
	Karang Tinggi	13.804	13.252	96
	Pondok Kelapa	16.476	2.801	17
	Talang Empat	9.402	4.795	51
	Total		46.261	41
	Luas wilayah	1.223.94 km ²		
Kota Bengkulu	Gading Cempaka	2.395	2.395	100
	Muara Bangka Hulu	2.387	1.623	68
	Teluk Segara	1.673	1.221	73
	Total		5.239	34
	Luas Wilayah	144.5 km ²		

Wilayah studi dari penelitian ini adalah Sub DAS Rindu Hati. Daerah ini terletak di Pusat Kabupaten Bengkulu Tengah. DAS Rindu Hati, yang mencakup beberapa desa, termasuk Desa Karang Tengah, Kota Niur, Detak Jantung, DAS Rindu Hati, Taba Teret, Tanjung Heran dan Tanjung Raman. Desa Rindu Hati merupakan Sub DAS hulu sebagai daerah isian DAS Air Bengkulu. Penelitian ini dipilih karena lokasinya di hulu DAS dan langsung berbatasan langsung dengan hutan lindung. Selain itu, Mengingat DAS ini merupakan lokasi studi untuk masukan dan keluaran air di suatu tempat pada periode tertentu, sehingga dapat untuk mengetahui jumlah potensi air Sub DAS Rindu Hati Hasil dari perhitungan pada daerah Dengan luas Sub DAS Rindu Hati 191.460.000m.

DAS Air Bengkulu merupakan DAS yang berlokasi pada dua kabupaten yakni di kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu salah satunya yaitu Sub DAS Rindu Hati. Desa Rindu Hati yang merupakan salah satu Sub DAS Air Bengkulu di kawasan hulu yang terdiri dari Kawasan Hutan Rindu Hati yang dilindungi (kode registrasi provinsi 75), mencakup area 8.440 ha. Sub DAS Rindu Hati memiliki panjang sungai utama sepanjang 19,4 kilometer.

Pelaksanaan Kolaborasi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu tidak bisa dilakukan hanya 1 lembaga/instansi saja, perlu adanya kolaborasi yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pelaksanaan Evaluasi Kolaborasi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu terus diusahakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu agar tercapai tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi program Collaborative terkait Evaluasi Kolaborasi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 20017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: Komunikasi, Koordinasi Pengambilan Keputusan, Penyelesaian Konflik,

Monitoring dan Evaluasi, Prosedur dan Perbaikan.

Hasil penelitian menunjukkan Lembaga/instansi yang memiliki wewenang dalam proses kolaboratif terkait Evaluasi Kolaborasi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu ialah Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung (BPDAS HL) Ketahun, Dinas PUPR Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Kota Bengkulu, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (Forum DAS) dan pihak lainnya yang ikut terlibat dalam dan berwenang seperti: PSDA Provinsi, DSDAP, BKSDA, PDAM Bengkulu, P3A dan Formas Bengkulu.

Berlandaskan hasil penelitian penulis dilokasi penelitian terkait proses kolaboratif dalam evaluasi kolaborasi kelembagaan dalam pengelolaan DAS Air Bengkulu. Proses Kolaboratif merupakan proses penting yang dilakukan, diawali dengan dialog tatap muka oleh Dinas BPDAS HL Ketahun, Forum DAS Air Bengkulu serta Dinas BWSS VII Kota dan Lembaga/instansi lainnya telah dilakukan pertemuan rutin terkait pengelolaan DAS Air Bengkulu untuk menemukan permasalahan DAS di Kabupaten/Kota dan mengevaluasi kegiatan yang telah diluncurkan dalam proses kolaboratif pengelolaan DAS Air Bengkulu. Lebih lanjut Dinas BPDAS HL Ketahun melakukan banyak program dilapangan untuk kegiatan mengevaluasi Daerah Aliran Sungai, Batas DAS Kecil, Rehabilitasi Hutan Lindung dan hal-hal lainnya

KESIMPULAN DAN SARAN

DAS Air Bengkulu merupakan DAS yang berlokasi pada dua kabupaten yakni di kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu salah satunya yaitu Sub DAS Rindu Hati. Dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada batas lintas wilayah administrasi serta peran Masyarakat, mengedepankan keterpaduan kepentingan berbagai sektor dan wilayah, menjadi dasar dalam perumusan strategi mempertahankan Daya Dukung DAS yang meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

Evaluasi program Collaborative terkait Evaluasi Kolaborasi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 20017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: Komunikasi, Koordinasi Pengambilan Keputusan, Penyelesaian Konflik, Monitoring dan Evaluasi, Prosedur dan Perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan Lembaga/instansi yang memiliki wewenang dalam proses kolaboratif terkait Evaluasi Kolaborasi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu ialah Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung (BPDAS HL) Ketahun, Dinas PUPR Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Kota Bengkulu, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (Forum DAS) dan pihak lainnya yang ikut terlibat dalam dan berwenang seperti: PSDA Provinsi, DSDAP, BKSDA, PDAM Bengkulu, P3A dan Formas Bengkulu.

Bersamaan dengan itu, hal-hal seperti kepemimpinan, kelembagaan, komitmen, serta perencanaan ada dilakukan pada evaluasi kolaborasi kelembagaan dalam pengelolaan DAS Air Bengkulu, hal ini disebutkan sebuah proses kolaboratif. Kebijakan ini dimulai oleh BPDAS HL Ketahun dan Forum DAS Air Bengkulu dikarenakan kedua Lembaga/instansi ini merupakan sentral dalam evaluasi kolaborasi kelembagaan dalam pengelolaan DAS Air Bengkulu dari sumber bergerak. Untuk selanjutnya dinaungi oleh pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera VII sebagai pihak lembaga layanan sarana prasarana yang mendukung dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk kolaborasi kelembagaan pengelolaan DAS Air Bengkulu yang terdapat pada Desa Rindu Hati sebagai studi kasus ini. Kemudian Lembaga-lembaga yang terkait dalam pengelolaan ini sebagai pihak yang dibutuhkan untuk membantu proses kolaboratif terkait evaluasi kolaborasi kelembagaan dalam pengelolaan DAS Air Bengkulu

Kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisa pemerintah kolaboratif terkait evaluasi kolaborasi kelembagaan dalam pengelolaan DAS Air Bengkulu. Tahapan

pertama dalam proses kolaboratif ialah dialog tatap muka yang dilakukan oleh Lembaga/instansi terkait pengevaluasian DAS Air Bengkulu di Desa Rindu Hati. Dalam tahapan ini menunjukkan bahwa Lembaga/instansi terkait evaluasi kolaborasi kelembagaan dalam pengelolaan DAS Air Bengkulu memiliki kepercayaan yang kuat.

Berdasarkan hasil penelitian di Sub DAS Rindu Hati, perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui kualitas DAS dengan beberapa indikator yang lain untuk menentukan apakah daerah aliran Sungai pada Sub DAS Rindu Hati perlu dipertahankan atau dipulihkan agar dapat menentukan pengelolaan DAS yang sesuai dengan kondisi DASnya serta perlunya rehabilitasi lahan pada Kawasan-kawasan hutan yang telah mengalami perubahan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina R. (2023). Evaluasi Kebijakan Perbaikan Jalan Dan Penerangan Jalan Untuk Kelancaran Aktivitas Warga Di Jatinangor Kota Sumedang. *Jurnal Perceka*, 1(1), 39-43.
- Al Fajri Bahri, S. P., Siregar, S. K., Par, A. M., Nur, R., Al-Adawiyah, R., Putra, E., ... & Panjaitan, S. (2022). *Evaluasi Program Pendidikan*. Umsu Press.
- Anriani, N. (2022). Evaluasi Program Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Dengan Model CIPP Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK). *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(4), 1328-1344.
- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). *Instrumen Pengumpulan Data*.
- Aprianty, H., & Triyanto, D. (2018). Implementasi Good Enviromental Governance Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Bengkulu. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(2), 136-148.
- Aziz, A. R. (2018). Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Cacat Tuna Netra Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitas Penyandang Cacat Netra Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(1), 11-23.
- Azmi Fendri. (2023). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara*. PT. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Bempah, I., Suprianto, B., & Hiola, A. S. (2022). Evaluasi Program Tatakelola Lingkungan Dan Penghidupan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Sekitar Daerah Aliran Sungai Bolango Dan Bone Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 1161-1176.
- Bursamin, B., Utama, S. P., & Barchia, M. F. (2018). Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu Berbasis Kemasyarakatan. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 7(2), 9-19.
- Djuanda, I. (2020). Implementasi Evaluasi Program Pendidikan Karakter Model Cipp (Context, Input, Process Dan Output). *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 3(01), 37-53.
- Elcaputera, A., & Frastien, D. (2020). Kajian Ecocide Terhadap Pertambangan Batubara Dalam Kawasan Hutan Pada Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 62-81.
- Hendrix, T., Isnasari, Y., Berliandaldo, M., & Kholiyah, S. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Efektivitas Produk Penelitian Dan Pengembangan. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(1), 41-64.

- Hespika, D. (2020). Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hutan Dikawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah (Doctoral Dissertation, IAIN BENGKULU).
- Muharika, D. (2019). Metodologi Penelitian Evaluasi Program. Alfabeta.
- Mukhadis, A. (2021). Evaluasi Program Pembelajaran Bidang Teknologi: Terminologi, Prosedur Dan Pengembangan Program Dan Instrumen. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob Di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(1), 82-98.
- Novalinda, R., Ambiyar, A., & Rizal, F. (2020). Pendekatan Evaluasi Program Tyler: Goal-Oriented. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 18(1), 137-146.
- Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik: Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan. Elex Media Komputindo. Pateda, S. A., Rahmat, A., & Zubaidi, M. (2020). Evaluasi Program Model Kickpatrick Pada Diklat Berjenjang Di Kabupaten Gorontalo. *E-Prosiding Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*, 121-128.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *Thejournalish: Social And Government*, 1(1), 33-37.
- Priono, S., & Rusli, Z. (2023). Pengembangan Wisata Kampung Bandar Berbasis Collaborative Governance Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 16011-16017.
- Putra, G., & Karjati, P. D. (2019). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 62-74.
- Raharja, S. U. J. (2008). Model Kolaborasi Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum. Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Publik, Depok: Universitas Indonesia.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Deepublish.
- Salampessy, M. L., & Lidiawati, I. (2024). Potensi Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Di Desa Cemplang. *Jurnal Hutan Tropis*, 5(2), 113-119.
- Satmaidi, E., Muthia, A. A., & Wulandari, W. (2018). Konsep Hukum Pengelolaan Tambang Batubara Berkelanjutan Berdasarkan Pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Provinsi Bengkulu. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(2), 198-214.
- Septiani, R. (2023). Evaluasi Kebijakan Dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Organisasi Di Kota Bandung. *Jurnal Perceka*, 1(1), 19-23.
- Sos, J. P. S. (2020). Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Unisri Press.
- Suprayogi, S., Purnama, L. S., & Darmanto, D. (2024). Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. UGM PRESS.
- Suryadin, A., Sari, W. P., & Nurfitriani, M. P. (2022). Evaluasi Program Model CIPP (Context, Input, Process, And Product) Antara Teori Dan Praktiknya. Samudra Biru.
- Suryani, H. A. (2019). ANALISIS KUALITAS AIR DAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMAR.
- Sutrisno, A., Wahyuni, E., & Titing, D. (2021). Daya Dukung Lingkungan Daerah Aliran Sungai Kayan Dan Sembakung Kalimantan Utara Dalam Penyediaan Pangan Dan Air. Syiah Kuala University Press.

Zairin, Z., Yanmesli, Y., & Srifitriani, A. (2019). Keberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Di Sub DAS Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, 4(2), 153-162.